HAK PREROGATIF PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM PEMILU 2024

Ahmad Fauzi¹, Mellyana Dwi Febrianti², Echo Restu Hidayat³,
Aulia Farda Ana Saputri⁴

ahmadfauzi05@student.ppns.ac.id¹, mellyanadwi@student.ppns.ac.id²,
echorestu05@student.ppns.ac.id³, auliafarda@student.ppns.ac.id⁴

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

ABSTRACT

The president's prerogative right is a constitutional power that allows decision-making without the approval of other institutions. It encompasses politics, economics, and defense, but can be abused. In Indonesia, the president plays a crucial role in maintaining the integrity of the state and democracy. However, in elections, the president does not have full authority over the KPU and Bawaslu. In this study, a literature review and normative research were conducted, referencing relevant laws and legal materials. The method used was qualitative with discourse analysis, analyzing legal texts and related literature to understand and evaluate the application of laws in a relevant context. The 2024 general election marks a significant moment for Indonesia. Jokowi, as president, is responsible for ensuring peaceful elections. Although campaigning is allowed, officials must adhere to neutrality rules. The president's prerogative rights related to elections are limited, with institutions like the KPU and Bawaslu having primary authority. The president has a responsibility to use their vote fairly. The Indonesian president does not have specific prerogative rights in elections, according to the 1945 Constitution and Law Number 7 of 2017. The KPU and Bawaslu have full authority in the electoral process, emphasizing the importance of the independence of these institutions. The president is expected to participate as an ordinary voter, adhering to the principle of equality in political participation and ensuring the integrity of the elections.

Keywords: Prerogative Right, General Election

ABSTRAK

Hak prerogatif presiden adalah kekuasaan konstitusional yang memungkinkannya mengambil keputusan tanpa persetujuan lembaga lain. Ini mencakup bidang politik, ekonomi, dan pertahanan, tapi dapat disalahgunakan. Di Indonesia, peran presiden krusial dalam mempertahankan keutuhan negara dan demokrasi. Namun, dalam pemilu, presiden tidak memiliki hak penuh atas KPU dan Bawaslu. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian melalui penelitian pustaka atau library research serta penelitian Normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lainnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis wacana, menganalisis teks hukum dan literatur terkait untuk memahami dan mengevaluasi penerapan undang-undang dalam konteks yang relevan. Pemilihan umum 2024 menandai momen penting bagi Indonesia. Jokowi, sebagai presiden, bertanggung jawab memastikan proses pemilu berlangsung damai. Meskipun diperbolehkan berkampanye, pejabat harus mematuhi aturan netralitas. Hak prerogatif presiden terkait pemilu terbatas, dengan lembaga seperti KPU dan Bawaslu memiliki otoritas utama. Presiden memiliki tanggung jawab menggunakan hak suaranya dengan cara yang adil. Presiden Indonesia tidak memiliki hak prerogatif yang spesifik dalam pemilihan umum, menurut UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan penuh dalam proses pemilu, menegaskan pentingnya independensi lembaga-lembaga tersebut. Presiden diharapkan turut serta sebagai pemilih biasa, mematuhi prinsip kesetaraan dalam partisipasi politik dan memastikan integritas pemilu.

Kata kunci: Hak Prerogatif, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Hak prerogatif presiden adalah wewenang yang diberikan kepadanya secara

konstitusional untuk mengambil keputusan tertentu tanpa harus melalui persetujuan dari lembaga lain, seperti parlemen atau yudikatif. Ini mencakup keputusan dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan nasional, serta kebijakan luar negeri. Prerogatif presiden memungkinkan presiden untuk bertindak cepat dan efisien dalam situasi darurat atau keadaan yang memerlukan keputusan segera, tetapi juga menimbulkan potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan hak prerogatif presiden sering kali menjadi fokus perdebatan dan pengawasan oleh masyarakat sipil dan lembaga negara lainnya.

Di konteks Indonesia, peran Presiden memiliki dimensi yang sangat krusial dalam mempertahankan keutuhan negara yang beragam secara budaya, agama, dan etnis. Sejak era reformasi, Presiden di Indonesia tidak hanya menjadi kepala pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol perubahan dan harapan bagi kemajuan demokrasi. Dengan konstitusi sebagai landasan, Presiden memiliki tanggung jawab untuk menjaga supremasi hukum, memperjuangkan hak asasi manusia, serta menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam konteks Indonesia yang geografisnya sangat beragam, peran Presiden sebagai pemersatu bangsa sangatlah penting. Presiden harus mampu menjalankan fungsi integrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta antara berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Kemampuan Presiden dalam membangun dialog dan konsensus menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan harmoni di tengah keragaman yang menjadi ciri khas Indonesia. Dalam hal diplomasi, Presiden Indonesia juga memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan perdamaian, kerjasama regional, dan pencapaian tujuan luar negeri yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Keberadaannya sebagai wakil negara di forum internasional memberikan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan membangun citra positif di mata dunia.

Presiden Joko Widodo sebagai presiden Indonesia pada tahun 2024 telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini karena keputusannya untuk ikut serta dalam pencalonan calon wakil presiden (cawapres) anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini telah menimbulkan beragam reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak. Di satu sisi, ada yang mendukung langkah tersebut sebagai wujud dukungan keluarga yang solid dan kesempatan bagi Gibran untuk memberikan kontribusi lebih dalam politik. Namun, di sisi lain, terdapat kritik yang mengemuka terkait nepotisme dan keberpihakan. Pada Rabu, 10 Oktober 2023, KPU menjadi pusat perhatian ketika informasi tentang pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebar luas. Kedua tokoh ini, masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda namun menarik perhatian publik. Prabowo, seorang mantan jenderal yang telah aktif di dunia politik selama beberapa tahun, memiliki basis pendukung yang kuat. Sementara Gibran, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, membawa popularitas dan dampak keluarga politik yang besar. Kehadiran mereka di panggung politik mengundang beragam reaksi dari masyarakat dan pengamat politik. Beberapa mendukung dengan antusiasme, melihat potensi perubahan dan kekuatan baru dalam dinamika politik Indonesia. Namun, ada juga yang skeptis dan mengkritik pencalonan ini sebagai bagian dari dinasti politik yang mereka anggap merugikan demokrasi. Perhatian juga tertuju pada kemunculan pasangan calon independen yang menarik, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Anies, yang dikenal sebagai figur reformis dan Muhaimin, seorang politisi berpengalaman, membentuk tandem yang menjanjikan campuran antara pemimpin yang berbasis pada pendidikan dan politisi dengan basis Islam moderat. Di sisi lain, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah petahana yang populer, dan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menawarkan kombinasi antara pengalaman pemerintahan yang solid dan pengetahuan

hukum yang mendalam. Kehadiran pasangan-pasangan ini menciptakan dinamika baru dalam kompetisi politik, memberikan opsi yang beragam bagi pemilih, dan mendorong pertarungan sengit untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Menurut UUD 1945, pencalonan presiden dilakukan melalui mekanisme yang demokratis dan terbuka. Calon presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di parlemen atau melalui jalur independen. Di Indonesia, pemilihan umum telah diatur dalam konstitusi negara, tepatnya dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prosedur pencalonan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Calon presiden harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti memiliki kewarganegaraan Indonesia sejak lahir, tidak pernah menjadi anggota organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, dan memenuhi syarat usia minimal. Selain itu, calon presiden juga harus mengajukan dokumen dan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi pijakan utama dalam melaksanakan proses demokrasi pemilihan umum di Indonesia. UU tersebut menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur tahapan, mekanisme, dan aturan yang harus diikuti oleh semua pihak terkait dalam pelaksanaan pemilu. Dengan menjadi sumber acuan, UU ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), peserta pemilu, serta seluruh masyarakat untuk menjalankan proses pemilihan umum secara adil, transparan, dan berkualitas. Dengan demikian, pencalonan presiden harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuduhan terhadap Joko Widodo yang menyebutkan bahwa ia ikut campur dalam proses pemilu 2024 menciptakan kontroversi yang signifikan. Sebagai seorang presiden, Joko Widodo memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas dan integritas proses demokratis, termasuk pemilihan umum. Namun, tuduhan tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika politik yang kompleks, dengan pihak-pihak yang memanfaatkan isu-isu politis untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun demikian, penting bagi lembaga penegak hukum dan otoritas terkait untuk menyelidiki tuduhan tersebut secara transparan dan adil untuk menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik. Sebagai seorang presiden, Joko Widodo harus tetap fokus pada tugas-tugasnya yang bersifat nasional dan memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian melalui penelitian pustaka atau library research serta penelitian Normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang terkait dengan substansi penelitian dan penerapan mengenai membaca, mendengar, memahami, dan mengkaji penerapan Undang-Undang, Karya ilmiah, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis wacana. Penelitian dilakukan dengan menganalisis teks-teks hukum serta literatur dan dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan memahami dan mengevaluasi penerapan undang-undang dalam konteks yang relevan dengan isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum 2024 di Indonesia memainkan peran krusial dalam konteks dinamika politik dan perkembangan demokrasi. Sebagai ritual politik terpenting, pemilu tidak hanya menetapkan kepemimpinan politik, tetapi juga mencerminkan tingkat partisipasi politik serta aspirasi masyarakat secara luas. Dalam kerangka sosiologis, pemilu menjadi panggung di mana berbagai segmen masyarakat, dari beragam lapisan dan latar belakang, bersatu untuk mengartikulasikan kebutuhan dan pandangan mereka. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 akan memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas politik, legitimasi pemerintahan, dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

1. Bagaimana Sikap Joko Widodo Selaku Presiden Indonesia Dalam Kontestasi Pemilu 2024?

Pemilihan umum 2024 menandai momen penting bagi Indonesia dalam memperkuat demokrasi dan stabilitas politiknya. Sebagai pemimpin negara, Jokowi memiliki tanggung jawab besar untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, serta memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan damai dan tertib. Dengan mengedepankan sikap yang tenang dan berwawasan jauh, Jokowi dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi semua pihak serta memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam proses demokrasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa presiden dan para menteri memiliki hak untuk berkampanye dan memihak dalam pemilu. Hal ini disampaikannya di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, pada Rabu (24/1/2024). Meskipun demikian, Jokowi menekankan bahwa pejabat yang terlibat dalam kampanye tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara. UU Pemilu, khususnya terkait Pasal 282 dan 283 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 282 berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”

Pasal 283 berbunyi:

- 1) “Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 282 dan 283 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi pijakan hukum yang mengatur perilaku pejabat negara dan struktural dalam konteks pemilihan umum. Pasal 282 secara tegas menegaskan larangan bagi pejabat untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu selama masa kampanye. Di sisi lain, Pasal 283 melarang pejabat untuk melakukan kegiatan yang menunjukkan preferensi terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan setelah kampanye. Larangan ini meliputi serangkaian aktivitas seperti pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian insentif kepada aparatur sipil negara di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Keduanya bertujuan untuk menjamin netralitas dan integritas proses pemilihan umum serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat dalam memengaruhi hasil pemilu. Namun apabila Presiden Joko Widodo memutuskan tetap ikut berkampanye dalam salah satu pasangan calon maka sesuai aturan hukum yang berlaku sesuai pasal 281 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi:

1. Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi

ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU

Pasal ini menegaskan bahwa kampanye Pemilu yang melibatkan pejabat tinggi negara seperti Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus mematuhi beberapa ketentuan. Pertama, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatan mereka, kecuali untuk keamanan yang diatur dalam perundang-undangan. Kedua, mereka harus menjalani cuti diluar tanggungan negara. Pelaksanaan cuti dan jadwal cuti harus mempertimbangkan kelangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah Jadwal cuti kampanye yang dilakukan oleh presiden disampaikan Menteri Sekretaris Negara kepada KPU maksimal 7 hari kerja sebelum presiden melaksanakan kampanye.. Dalam situasi seperti ini, penting bagi Jokowi untuk mempertahankan netralitasnya terhadap pemilu, dengan tidak memihak salah satu paslon. Kehadirannya sebagai pemimpin negara haruslah di atas kepentingan politik pribadi atau partai, untuk memastikan integritas dan keadilan pemilu yang berlangsung. Dengan mempertahankan netralitasnya, Jokowi dapat memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasilnya diterima dengan baik oleh semua pihak.

2. Bagaimana Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemilu 2024?

Seperti yang telah diketahui bahwa hak prerogatif presiden selamanya melekat dan sah selama presiden masih menjabat aktif. Secara istilah, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) prerogatif diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Namun demikian, perlu diingat bahwa presiden juga harus bertindak dengan penuh kebijaksanaan dalam menggunakan kekuasaan dan hak prerogatifnya. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang cermat, tidak sewenang-wenang, serta selalu mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, supremasi hukum, dan kepentingan nasional. Hak prerogatif presiden diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 kali. Berikut merupakan hak prerogatif yang tertera pada presiden sesuai UUD 1945.

1. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang membuat akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
2. Pasal 13 ayat (2) UUD 1945:
 - a. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
 - b. Presiden menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
3. Pasal 14 UUD 1945:
4. Presiden memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
5. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
6. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang undang.
7. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

8. Pasal 23F ayat (1) UUD 1945: Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
9. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
10. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945: Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
11. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945: mahkamah konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.

Berdasarkan analisis terhadap UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hak prerogatif yang secara eksplisit diberikan kepada presiden terkait pengaturan pemilihan umum. Kewenangan terkait pemilu diamanatkan kepada lembaga-lembaga yang ditetapkan dalam konstitusi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai pada Undang Undang Nomor 7 tahun 2017. Oleh karena itu, implikasinya adalah bahwa presiden tidak memiliki kewenangan langsung atau prerogatif yang terpisah terhadap proses pemilu, melainkan diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945. Dengan otoritas penuh yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu dalam mengatur mekanisme pemilihan umum, konsekuensinya adalah presiden tidak memiliki hak penuh untuk mengatur mekanisme pemilu yang berada di atas kewenangan KPU dan Bawaslu. Prinsip ini menegaskan pentingnya independensi lembaga-lembaga tersebut serta mengharuskan presiden untuk menghormati otonomi mereka. Sebagai hasilnya, prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan lembaga-lembaga independen terjaga, yang merupakan cerminan dari komitmen pada prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap proses politik yang transparan dan adil dalam konteks pemilihan umum. Sebagai warga negara yang memiliki hak suara, presiden memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak pilihnya melalui proses pencoblosan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tindakan ini bukan hanya mencerminkan kewajiban hukum presiden sebagai warga negara, tetapi juga menegaskan prinsip kesetaraan dalam kedudukan di hadapan hukum. Oleh karena itu, meskipun memegang jabatan yang tinggi dalam struktur kekuasaan negara, presiden diharapkan untuk turut serta dalam proses demokratis pemilihan umum dengan cara yang sama seperti warga negara lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif presiden dalam konteks pemilihan umum tidak terdefiniskan secara spesifik. Kewenangan terkait proses pemilu lebih cenderung diberikan kepada lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mekanisme demokratis lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, presiden tidak memiliki wewenang langsung atau prerogatif yang terpisah terhadap proses pemilu. KPU dan Bawaslu diakui memiliki otoritas penuh dalam mengatur dan mengawasi mekanisme pemilihan umum, yang menegaskan pentingnya independensi lembaga-lembaga tersebut dalam menjaga integritas demokrasi. Sebagai konsekuensi, presiden diharapkan untuk turut serta dalam proses demokratis pemilihan umum sebagai pemilih biasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan refleksi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam konteks partisipasi politik. Oleh karena itu, presiden diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945, menjunjung tinggi

supremasi hukum, dan memastikan integritas proses pemilihan umum. Presiden memegang peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara. Tanggung jawabnya meliputi kepentingan rakyat serta keselamatan dan keamanan nasional. Dalam konteks akademik, penelitian mendalam tentang keputusan dan tindakan presiden dalam situasi yang beragam sangat penting. Analisis wacana terhadap pidato dan kebijakan presiden dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang prioritas dan strategi pemerintahan dalam menangani berbagai isu yang dihadapi negara. Dengan demikian, penelitian tentang peran presiden tidak hanya memperkaya pemahaman terkait tentang sistem politik, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga untuk kebijakan publik dan tata kelola negara yang lebih efektif dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo (1996) Mendemokratiskan pemilu. Jakarta: ELSAM.
- Hady, N. (2010) Teori Konstitusi & negara demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945. Malang: Setara Press.
- Soehino (2010) Hukum Tata Negara: Perkembangan pengaturan dan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM.
- Susanto. Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden. Jurnal Yudisial, Vol. 9 No.3 Desember 2016.
- Terkini, B. (2022) Pengertian Dan Jenis Hak Prerogatif presiden, kumparan. Available at: <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-jenis-hak-prerogatif-presiden-1zOTuPYPr2z> (Diakses 18 Maret 2024).
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.